Koordinasi Antar Pihak:
Desa Mandiri, Tata Ruang dan Pelestarian Hutan
Lokakarya Bangun Agenda Bersama IV,
28-30 Maret 2003



Kabar dari

TIM PENGELOLAAN HUTAN

BERSAMA

HULU SUNGAI MALINAU

No. 14, April 2003

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang baik,

Pada hari Jum'at 28 Maret 2003 balai desa Setarap terlihat ramai-ramai dengan wakil dari 18 desa yang ada di daerah aliran Sungai Malinau. Ada sekitar 50 peserta yang penuh semangat mengikuti lokakarya "Bangun Agenda Bersama 4" yang kali ini diselenggarakan di desa Setarap / Punan Setarap. Selain wakil peserta dari masyarakat, juga datang Pak Adjang Kahang, Camat Malinau Selatan, Pak Yermia Bumbu, Pak Mika Yusuf dan Pak Mathias Henry dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta Pak Leonard Mangetan dari Bappeda. Pak Mika, Pak Mathias dan Pak Leonard mengikuti acara lokakarya selama dua hari. Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan diundang, tapi tidak jadi hadir.

Apa yang dibahas selama tiga hari? Beberapa program pemerintah seperti Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, Pembentukan Badan Perwakilan Desa, program Kecamatan Malinau Selatan, ada beberapa wakil masyarakat menceritakan pengalaman studi banding dan ada penjelasan program kerja CIFOR tahun 2003.

SELAMAT MEMBACA!



Presentasi Program Kecamatan Malinau Selatan oleh Bpk Camat, Adjang Kahang

Kecamatan dalam rencana pembangunannya menekankan

- pembangunan ekonomi,
- peningkatan sumber daya manusia dan
- pembinaan masyarakat terasing yaitu suku Punan yang masih hidup tersebar dalam kelompok kecil

Mulai tahun ini kecamatan dialokasikan dana subsidi sebesar 1 milyar yang dikelola langsung oleh kecamatan. Karena dana ini sangat terbatas mengingat ada 24 desa yang membutuhkan pembangunan, tentunya yang akan dilayani terdahulu adalah kebutuhan yang prioritas. Proyek pembangunan prioritas lalu akan dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk pengembangan ekonomi Camat mengundang semua masyarakat untuk memberi masukan, khususnya mengenai potensi yang ada di tiap desa dan usulan pengembangannya.

Beberapa hal yang dibahas khusus adalah

- **Tata batas**: Camat merencanakan akan menata ulang dan menegaskan tata batas semua desa dalam waktu dekat. Untuk itu Camat merencanakan akan mengadakan musyawarah antar desa. Semua desa diberi kesempatan menyatakan masalahnya tetapi jika sesudah ini batas sudah disepakati maka tidak perlu diubah lagi. Bila ada konflik agar dibicarakan dulu. Juga tata batas hanya bisa diselesaikan atas dasar keinginan

masyarakat. Jika masyarakat tidak bersedia maka keterlibatan pemerintahpun tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini Camat juga menekankan pentingnya orang asli dan pendatang saling menghargai dan tidak berbuat semau-maunya.

- **IPPK dan minat untuk beralih ke HPH mini:** Camat mengingatkan agar masyarakat mempertimbangkan dengan baik untung dan rugi. Jangan sampai pengalaman negatif yang lalu terulang apalagi karena sampai sekarang belum juga ada kesepahaman mengenai istilah yang dipakai seperti wilayah, batas desa, hutan adat dan tanah adat.

Program pembentukan BPD di Malinau Selatan akan segera dimulai dengan siapnya petunjuk dari PMD.

Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (GerBang DeMa)

Dengan gaya bersemangat Pak Yermia Bumbu menjelaskan agar desa bisa mandiri pemerintahan desa perlu jalan dengan baik. Pak Yermia sebut bahwa diharapkan kalau sudah terbentuk Badan Perwakil Desa (BPD) aspirasi masyarakat menjadi dasar pembangunan desa. Langkah berikut-nya untuk mendukung GerBang DeMa adalah penambahan modal dan teknologi, perencanaan secara partisipatif, menjalin kemitraan dengan pihak lain dan belajar dari pengalaman orang lain.

Setelah penjelasan ada beberapa peserta yang tanya tentang BPD; kapan akan dibentuk dan persyaratan untuk bisa terpilih sebagai anggota BPD. Syarat yang disampaikan adalah WNI, beragama dan berpendidikan paling tidak SMP. Untuk desa dengan jumlah penduduk di bawah 500 jiwa jumlah anggota BPD lima orang, Desa dengan 501 s/d/1000 jiwa tujuh anggota, 1000s/d2500 sembilan anggota ; dan 2500 s/d 3500 sebelas anggota.





Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Pembentukan/Penggabungan Desa

Penjelasan khusus mengenai BPD dipresentasikan oleh Pak Mikah Jusuf dari Dinas PMD. Sebagai tambahan informasi, Dinas PMD telah juga membagikan buku petunjuk pembentukan BPD. Informasi ini dilengkapi juga dengan Warta Kebijakan CIFOR mengenai Otonomi Desa.

Pada dasarnya BPD merupakan DPR tingkat desa dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri terdiri dari Kepala Desa dan aparat desa. Sebagai mitra pemerintah desa, BPD berfungsi antara lain memantau jalannya pemerintahan, menetapkan peraturan desa dan menetapkan anggaran desa. Atas jasanya itu tentunya anggota BPD patut menerima gaji/honor yang dibebankan pada anggaran desa.

Salah satu program pemerintah kabupaten dalam hal menata pemerintahan desa adalah program penggabungan desa. Seperti pembentukan BPD, penggabungan desa ditetapkan dalam Perda no 2, 21 tentang Pemerintahan Desa berlandaskan UU no 22, 1999. Penjelasan mengenai program ini disampaikan Bapak Matias Henri, yang juga staf Dinas PMD. Pak Matias mulai dengan menekankan perlunya memikirkan kepentingan bersama masyarakat kabupaten. Tujuan penggabungan desa terutama untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelayanan oleh pemerintah dan mempermudah pembinaan. Di Kecamatan Malinau Selatan kemungkinan hanya beberapa desa (3-4 desa) yang memang sudah berada di satu lokasi yang kemungkinan digabung,

Juga untuk program ini PMD telah menyediakan buku petunjuk yang dibagikan pada saat lokakarya.

Ketika ditanya apakah masyarakat boleh menolak penggabungan maka dijawab bahwa masyarakat desa memang berhak menolak. Dan memang menurut perundangan yang ada pembentukan dan penggabungan desa adalah berdasarkan prakarsa masyarakat dan atas kesepakatan antar desa yang bergabung (ataupun berpisah). Menurut staf PMD, pilihan untuk bergabung atau tidak diserahkan sepenuhnya pada masyarakat.

Jajak pendapat peserta lokakarya mengenai penggabungan desa

Dari 51 peserta yang memberikan masukan ada 31 yang tidak setuju dengan penggabungan dan ada 20 peserta yang setuju.

Alasan tidak setuju :	
Tidak percaya pemerintahan akan lebih baik setelah penggabungan	11
Takut kehilangan hak	9
Takut kehilangan identitas	6
Beda tradisi	2
Jumlah penduduk cukup	2
Anggap tidak perlu	2

Alasan setuju:	
Sesuai dengan Perda	5
Supaya pemerintah desa lengkap	5
Jumlah penduduk kurang	4
Karena cocok gabung	3
Dengan syarat hak tidak hilang	2
Asal tidak dimekarkan	1
Akan mengurangi sengketa	1

HPH Mini dan Dana Reboisasi

Karena tidak ada wakil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan masyarakat bersama-sama melihat informasi yang dibutuhkan tentang kedua program ini. Dalam pembahasan tentang HPH mini (sebutan masyarakat untuk Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu = IUPHHK) timbul banyak pertanyaan, mulai dari pertanyaan paling pokok; apa pengertian HPH mini. Dari pertanyaan ini diketahui bahwa masyarakat selama ini masih belum dapat informasi yang jelas walaupun di beberapa desa mayarakat mengatakan berharap HPH mini dapat menggantikan IPPK. Pertanyaan lain yang muncul menyangkut manfaat untuk masyarakat dari HPH mini, misalnya apakah HPH mini harus membantu masyarakat, apakah masyarakat akan dapat fee dan bedanya IPPK dengan HPH mini.

Masyarakat ingin tahu apakah mereka sendiri dapat mengusul untuk dapat HPH mini atau bisa sendiri mencari mitra kerja. Ada beberapa usulan dari masyarakat agar areal HPH mini dipetakan dengan jelas oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan agar Dinas tersebut juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan oleh HPH mini.

Karena di beberapa desa masyarakat sudah punya pengalaman dengan program dana reboisasi maka kelompok kecil yang membahas program ini punya beberapa usulan untuk pelaksanaan program DR di masa mendatang. Usulan pertama adalah agar dana DR tidak hanya digunakan untuk penanaman kayu tapi bisa untuk kegiatan pembangunan desa seperti air bersih, peternakan atau peningkatan sumberdaya

manusia. Masyarakat mengharap agar mereka sendiri dapat memilih jenis tanaman yang akan ditanam dan bahwa waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi kesibukan masyarakat. Agar pelaksanaan program lebih terbuka bagi masyarakat diminta ada tahap penjelasan terlebih dahulu. Kalau program sudah jalan masyarakat mengharap bisa dengan pola swakelola dengan pendampingan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Setelah diskusi tentang kedua topik ini disepakati bahwa Tim Pengelolaan Hutan Bersama CIFOR akan menyampaikan daftar pertanyaan dan usulan ini kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan harapan dapat informasi tertulis yang akan disebarkan kembali kepada 27 desa di daerah aliran Sungai Malinau.

Beberapa Pengalaman dari Studi Banding

Pak Yusuf Anye dari Sengayan menyampaikan hikmah yang diperolehnya dari perjalanan ke Kutai Barat (yang didampingi oleh CIFOR):

- Sebaiknya masyarakat mengembangkan potensi unggulan daerah seperti misalnya meranti dan ulin
- Agar jangan tergiur dengan promosi dari luar (khususnya jati dan sengon) karena belum tentu sesuai sedangkan waktu panennya lama
- Masyarakat (Sengayan) ternyata berminat mengembangkan karet tetapi usulannya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk memanfaatkan dana reboisasi untuk itu tidak diterima. Masyarakat hanya dijanjikan uji coba 1 ha yg sampai sekarang belum direalisasi.

Dalam diskusi sesudah penyajian dipermasalahkan sedikit mengenai jangka waktu jenis meranti dan ulin yang lebih panjang dari jati yang hanya 15 tahun. Sebenarnya yang lebih penting adalah bahwa jati super belum terbukti tumbuh lebih baik dari jati lokal. Bahkan dari Malaysia ada informasi bahwa jati super kurang baik hasilnya. Pertumbuhan yang cepat membuat serat kayu lemah sehingga pohon mudah tumbang.

Hal yang kemudian ramai dibicarakan adalah pengembangan kelapa sawit. Banyak anggota masyarakat tidak setuju karena antara lain perkebunan kelapa sawit tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kayu atau binatang buruan dan ketergantungan besar pada pabrik. Lagipula, masyarakat curiga bahwa sasaran utama adalah kayu dan bukan pengembangan perkebunan. Meskipun demikian, pihak pemerintah (Bappeda) menjelaskan bahwa di Kabupaten Malinau sudah ada program pengembangan kelapa sawit dan bahkan lokasinya sudah ditetapkan. Pak Musa dari Tanjung Nanga kemudian menyampaikan pengalamannya di Sulawesi Selatan dimana ia melihat peternakan sapi dan babi, kebun kopi, kebun murbei, vanili, pesawahan dan pengelolaan obyek wisata.

Presentasi terakhir adalah Ramses Iwan dari Setulang tentang pengalamannya mengikuti pertemuan di Jepang mengenai pelestarian air. Pertemuan itu dihadiri oleh banyak orang dari berbagai negara yang kebanyakan memperagakan kegiatan mengatasi pencemaran air. Maka bersyukurlah masyarakat Malinau yang masih mempunyai hutan dan air bersih.



Tata Ruang

Dalam lokakarya kali ini ada beberpaa kegiatan berkaitan dengan tata ruang antara lain presentasi rencana tata ruang kabupaten, pengalaman dengan pengmebangan tata guna lahan di desa Loreh dan beberapa permainan untuk memicu diskusi.

Dalam presentasi oleh BAPPEDA dijelaskan bahwa tata ruang kabupaten sudah disusun tetapi belum di-PerDa-kan. Menurut Pak Leonard masih ada kesempatan untuk memberikan masukan dan sudah ada album dengan semua peta yang nanti akan dibagi satu berkas di setiap kecamatan.

Kegiatan Tim CIFOR bersama masyarakat di Loreh bertujuan untuk membahas perbedaan kepentingan dan pandangan berbagai kelompok masyrakat dalam satu desa dan bagaimana bisa memadukan kepentingan menjadi satu tata guna lahan desa.

Permainan menunjjukkan bahwa masyarakat menempatkan hutan lindung di bagian hulu, lahan pertanian dekat pemukiman dan hutan produksi di bagian hilir. Peserta juga sadar bahwa desa tidak berdiri sendiri dan kegiatan di satu desa (misalnya kegiatan penebangan) berpengaruh pada desa tetangganya. Karena itu perlu ada koordinasi antara desa.

Lokakarya MultiPihak Kota Malinau
Pada hari terahkir peserta memilih lima utusan untuk menghadiri lokakarya tersebut yang diselengara-kan (tanggal 31 Maret dan 1 April) oleh CIFOR dengan Pemda Malinau. Untuk memudahkan penyebaran informasi tentang hasil pertemuan ini pilihan didasarkan pada lokasi pusat perayaan Paska. Lima utusan adalah: Yakob Ungket, Martha Ita, Kalep Ivung, Bisin Djare, Yonatan Aran.

Tindak Lanjut
Masukan yang diberikan oleh peserta dapat dibagi dalam beberapa kelompok besar; Hal yang paling banyak disebut ada harapan masyarakat bahwa ada kelanjutan untuk mendapatkan kepastian tentang batas dan wilayah desa, termasuk gagasan dari peserta untuk menyusun tata guna lahan desa dan ada tanggapan tentang penggabungan desa. Sebagian peserta menyampaikan harapan mereka agar kerjasama antara masyarakat dengan CIFOR akan tetap berlanjut dan minta diadakan lokakarya lagi. Ada juga peserta yang mengusul agar CIFOR jadi mitra langsung dengan desa dan satu peserta CIFOR bermitra langsung dengan PemKab. Harapan ini seirama dengan tujuan program CIFOR.

Beberapa peserta mengharapkan ada penyebaran informasi termasuk ten-tang Peraturan Daerah. Selain itu ada beberapa usulan seperti mengadakan studi banding lagi, uji coba karet satu hektar atau program dana reboisasi. Hal-hal ini terkait dengan perencanaan CIFOR sendiri yang berupa kegiatan berkait dengan tata guna lahan desa, pengembangan ekonomi masyarakat, dukungan atas penyelesaian batas wilayah desa, kesadaran hukum, pengelolaan konflik dan studi banding.

Kesimpulan
Hubungan Pemda Malinau dengan masyarakat DAS Malinau semakin akrab melalui dialog mengenai program pemerintah dan harapan masyarakat terhadap program itu. Suasana yang santai dan nyaman memungkinakan masyarakat bertukar pikiran secara leluasa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan semua pihak pada tahun 2003 ini adalah: peluang meningkatkan ekonomi lewat HPH mini dan bagaimana dampaknya pada masyarakat dan luas hutan, penyesuaian pemanfaatan dana reboisasi dengan kepentingan masyarsakat dan Pemda, bagaimana mengaitkan tata ruang yang disusun di tingkat desa dan di kabupaten, penyelesaian batas desa dan peningkatan kemampuan masyarakat membentuk BPD dan memfungsikannya. Untuk mencapai tujuan ini, tim CIFOR akan terus bekerja sama dengan Pemda Malinau dan masyarakat mendampingi koordinasi antar pihak dan belajar dari pengalaman.

CIFOR
CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH

Godwin Limberg, Made Sudana, Ramses Iwan, Moira Moeliono, Steve Rhee, Lini Wollenberg

CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Desa Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang
JKPWB
Bogor 16680 Telp. (0251) 622-622

Atau lewat surat:
CIFOR
PO Box 6596
Jakarta 10065